



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

Jln. Perempatan Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Nomor Telepon Staff : (0274) 452220 Fax : (0274) 452254
Email : dilmil211yogyakarta@gmail.com Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Hal : Laporan Hakim Pengawas Bidang
Keseekretariatan dan Pelayanan
Publik Triwulan II TA. 2025.

Yth. Koordinator Hakim Pengawas Bidang
di
Yogyakarta.

1. Dasar :

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- b. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- d. Keputusan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor 119/KPM.W2-Mil04/SK.PW1.2.1/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Pembentukan Tim Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
- e. Program Kerja dan Anggaran Dilmil II-11 Yogyakarta TA. 2025.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas dengan ini dilaporkan hasil temuan pengawasan pada Bidang Keseekretariatan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana terlampir.

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Hakim Pengawas Bidang
Keseekretariatan

Aditya Candra Christyan
Mayor Chk

Dokumentasi kegiatan Hakim Pengawas Bidang



Dokumentasi kegiatan Hakim Pengawas Bidang



Lampiran : Laporan Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan
Pelaporan Triwulan II Tahun 2025

NO	TANGGAL	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	SARAN
1	1 April 2025 s/d 30 Juni 2025	3	4	5	6	7
1		Belum terdapatnya kelengkapan sarana tata kepegawaian mengenai data personil elektronik yang ada pada Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/2007 tentang memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.	Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital.	Tidak terlaksananya program Mahkamah Agung tentang perkembangan zaman digitalisasi.	Agar Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana mengajukan kebutuhan sarana pendukung (monitor) untuk menampilkan data personil elektronik pada staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
2		Website pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai dengan saat ini masih dalam proses <i>maintenance</i> (pemeliharaan).	Keterbukaan informasi publik sebagaimana Kep Ketua MARI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Jika masih dalam proses <i>maintenance</i> (pemeliharaan) seharusnya staf PTIP mengumumkan kondisi tersebut melalui sosmed (<i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i> tentang <i>WhatsApp</i> nomor yang bisa dihubungi), agar para pencari keadilan masih bisa mengakses kebutuhan yang diinginkan.	Apabila tidak ada pemberitahuan maka akan mempersulit akses apa saja yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan.	Agar staf PTIP mengumumkan ke sosmed (<i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i> tentang nomor <i>WhatsApp</i> yang bisa dihubungi) agar kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh para pencari keadilan bisa terpenuhi.

3		<p>Keterlambatan dalam memberikan informasi yang harus disampaikan di sosmed (<i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i>) seluruh kegiatan pada Pengadlan Militer Il-11 Yogyakarta.</p>	<p>1. Keterbukaan informasi publik sebagaimana Kep MARI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadlan; 2. Program Kerja dan Anggaran Pengadlan Militer Il-11 Yogyakarta TA. 2025</p>	<p>Masih terdapat kurangnya koordinasi dan komunikasi antar staf pada Pengadlan Il-11 Yogyakarta.</p>	<p>Terjadinya keterlambatan dalam memberikan informasi kepada para pencari keadilan tentang kegiatan pada Pengadlan Militer Il-11 Yogyakarta.</p>	<p>Agar seluruh personil pada Pengadlan Militer Il-11 Yogyakarta saling koordinasi dan komunikasi tentang adanya kegiatan pada Pengadlan Militer Il-11 Yogyakarta sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam memberikan informasi kepada para pencari keadilan.</p>
4		<p>Belum dilaksanakan pemeliharaan (service) Genzet.</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.</p>	<p>Dalam kurun waktu yang lama akan mengakibatkan kerusakan apabila tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala.</p>	<p>Dikhawatirkan akan menjadi rusak apabila dipergunakan dalam keadaan mendasak.</p>	<p>Agar petugas yang bertanggungjawab terhadap penggunaan Genzet mengajarkan permohonan ke Kepala Staf Umum untuk dilakukannya pemeliharaan secara berkala.</p>
5		<p>Administrasi pertanggungjawaban belanja gaji dan tunjangan belum sesuai dengan ketentuan karena masih terdapat beberapa bukti</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>Kurangnya pengendalian dari pejabat internal pada masing-masing bagian dalam melakukan administrasi, sehingga akan menjadi temuan</p>	<p>Menghambat tugas pokok kesekretariatan dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan.</p>	<p>Mohon kiranya Sekretaris memerintahkan kepada pejabat terkait agar tertib administrasi atau memerintahkan kepada petugas</p>

		tanda terima yang belum ditandatangani oleh penerima uang.		apabila monitoring evaluasi Pengadilan Banding.	ada dan dari tingkat	pejabat keuangan untuk meminta tanda terima kepada seluruh anggota Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
--	--	--	--	---	----------------------	---

Yogyakarta, Juni 2025
Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan



Aditya Candra Christyan
Mayor Chk

Lampiran : Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan Triwulan II Tahun 2025

NO	TANGGAL	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	SARAN	TINDAK LANJUT
1	1 April 2025 s/d 30 Juni 2025	3	4	5	6	7	7
1		Website Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta sampai dengan saat ini masih dalam proses <i>maintenance</i> (pemeliharaan).	Keterbukaan informasi publik sebagaimana Kep Ketua MARI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadalan.	Jika masih dalam proses <i>maintenance</i> (pemeliharaan) seharusnya staf PTIP mengemukakan kondisi tersebut melalui <i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i> tentang nomor <i>WhatsApp</i> yang bisa dihubungi), agar para pencari keadilan masih bisa mengakses kebutuhan yang diinginkan.	Apabila tidak ada pemberitahuan maka akan mempersulit akses apa saja yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan.	Agar staf PTIP mengemukakan ke <i>sosmed</i> (<i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i>) tentang nomor <i>WhatsApp</i> yang bisa dihubungi) agar kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh para pencari keadilan bisa terpenuhi.	Telaah di tindak lanjuti dengan membuat pengumuman di media sosial (<i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i>) dengan mencantumkan nomor HP dan <i>WhatsApp</i> yang bisa dihubungi agar kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan dapat terpenuhi
2		Keterlambatan dalam memberikan informasi yang harus disampaikan di <i>sosmed</i> (<i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i>) seluruh kegiatan pada Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta.	1. Keterbukaan informasi publik sebagaimana Kep Ketua MARI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadalan; 2. Program Kerja dan Anggaran Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta TA. 2025	Masih terdapat kurangnya koordinasi dan komunikasi antar staf pada Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta.	Terjadinya keterlambatan dalam memberikan informasi kepada pencari keadilan tentang kegiatan pada Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta.	Agar seluruh personil pada Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta saling koordinasi dan komunikasi tentang adanya kegiatan pada Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta tidak terjadi keterlambatan	Telaah di tindak lanjuti dengan melaksanakan koordinasi dengan bagian kepaniteraan dan kesekretariatan, agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyajikan informasi /mengupload kegiatan Pengadalan Militer Il-11 Yogyakarta pada media sosial.

Dokumentasi Tindak Lanjut Temuan Hakim Pengawas Bidang





Lampiran : Laporan Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan
Pelaporan Triwulan II Tahun 2025

NO	TANGGAL	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	SARAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 April 2025 s/d 30 Juni 2025	Belum terdapatnya kelengkapan sarana kepegawaian mengenai data personil elektronik yang ada pada Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Lembaga Peradilan.	Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital.	Tidak terlaksananya program Mahkamah Agung tentang perkembangan zaman digitalisasi.	Agar Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana mengajukan kebutuhan sarana pendukung (monitor) untuk menampilkan data personil elektronik pada staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pengajuan monitor untuk menampilkan data secara digital ke kasubbag Umum dan Keuangan telah dilaksanakan

Hakim Pengawas
Bidang Kepegawaian dan Ortala,



Aditya Candra Christyan
Mayor Chk

Yogyakarta, Juli 2025
Plt Kasubbag Kepegawaian,
dan Ortala



Lailatul Hidayah Muyassaroh

Mengetahui,
Koordinator Hakim Pengawas Bidang



Tabah Prasetya
Letnan Kolonel Chk

Dokumentasi Tindak Lanjut Hakim Pengawas Bidang



LAPORAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
TRIWULAN II TA. 2025
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA



HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

SAMSUL ARIFIN, S.H.
MAYOR CHK NRP 21960369130576



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Staff: (0274) 452220 Fax: (0274) 452254
www.dilmil-yogyakarta.go.id , dilmil211yogyakarta@gmail.com

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Perihal: Laporan Hakim Pengawas Bidang
Laporan Pengaduan Triwulan II TA 2025.

Yth. Koordinator Hakim Pengawas Bidang
di
Yogyakarta.

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - b. Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi Tahun 2009;
 - c. Keputusan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor 119/KPM.W2-Mil04/SK.PW1.2.1/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Pembentukan Tim Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
 - d. Program Kerja dan Anggaran Dilmil II-11 Yogyakarta TA 2025.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas dengan ini dilaporkan hasil temuan pengawasan pada Bidang Laporan Pengaduan periode Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana terlampir.
3. Hasil pengawasan Bidang Laporan Pengaduan periode Triwulan II Tahun 2025 sudah ditindaklanjuti.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Hakim Pengawas Bidang
Laporan Pengaduan



Samsul Arifin
Mayor Chk

Lampiran : Laporan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
Dan Persidangan Triwulan II Tahun 2025

NO	TANGGAL	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	SARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	1 April 2025 s/d 30 Juni 2025	Penggantian Box berkas perkara yang mengalami basah dikarenakan kebocoran atap. Pelaksanaan pergantian box sudah dilakukan dengan Box Coklat	Pada dasarnya Arsip berkas perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menunjukkan nomor berkas perkara dan tahun putusannya sehingga memudahkan dalam pengumpulan dan penghimpunan di setiap rak arsip.	Pergantian box berkas perkara yang basah banyak sehingga belum dilakukan penulisan pada sampul box tersebut	Belum terhimpunnya berkas yang diganti boxnya sehingga mempersulit dalam penempatan dan pengarsipan berkas sesuai dengan tahun putusan.	Panitera dan Panmud Hukum hendaknya memastikan berkas yang diganti boxnya untuk ditulis tahun diputusnya dan nomor berkas perkaranya sehingga memudahkan dalam pengarsipannya.
2	1 April 2025 s/d 30 Juni 2025	Pengisian Buku Register pada Buku Himpunan Putusan ke-1 Tahun 2025 masih ada penulisan pada kolom 5 "Dakwa dan Kualifikasi" penulisan kualifikasi masih ada yang ditingkat seperti	Pada dasarnya penulisan pasal Dakwaan dan kualifikasi harus lengkap sesuai dengan pasal yang diadawakan dan kualifikasi pasal tersebut	Kurang telitinya petugas dalam mengisi buku register himpunan putusan sehingga ada kolom yang tidak tuntas dalam penulisan	Penulisan pada kolom Dakwaan dan kualifikasi tidak lengkap dan dapat menjadi temuan oleh pengawas pada saat Binwas Diteliti dan Ditmitama.	Agar Panitera menekankan kepada Panitera Pengganti dalam menulis pada buku Register Himpunan Putusan ditulis dengan lengkap sesuai kualifikasi pada

		pada nomor urut 13, 14, 15, 16 dan 18 ditulis "desersi" seharusnya penulisananya "Desersi dalam waktu damai"				amar putusan sehingga meminimalisi temuan dan sesuai dengan judul kolom.
--	--	--	--	--	--	--

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
dan Persidangan


Samsul Arifin
Mayor Chk

Lampiran : Laporan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
Dan Persidangan Triwulan II Tahun 2025

NO	TANGGAL	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	SARAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 April 2025 s/d 30 Juni 2025	Penggantian Box perkara yang mengalami basah dikarenakan kebocoran atap. Pelaksanaan pergantian box sudah dilakukan dengan Box Coklat	Pada dasarnya Arsip perkara Pengadialan Militer II-11 Yogyakarta menunjukkan nomor berkas perkara dan tahun putusannya sehingga memudahkan dalam pengumpulan dan penghimpunan di setiap rak arsip.	Pergantian box berkas perkara yang basah banyak sehingga belum dilakukan penulisan pada sampul box tersebut	Belum terhimpunnya berkas yang diganti boxnya sehingga mempersulit dalam penempatan dan pengarsipan berkas sesuai dengan tahun putusan.	Panitera dan Panmud Hukum hendaknya memastikan berkas yang diganti boxnya untuk ditulis tahun diputusnya dan nomor berkas perkaranya sehingga memudahkan dalam pengarsipannya.	Sudah ada dukungan pengadaan BOX Berkas perkara dan Penempelan Penulisan Nomor Perkara dan Tahun Putus Perkara pada BOX Berkas Perkara sudah ditindaklanjuti
2	1 April 2025 s/d 30 Juni 2025	Pengisian Buku Register pada Buku Himpunan Putusan ke-1 Tahun 2025 masih ada penulisan pada kolom 5 "Dakwaan dan Kualifikasi" penulisan kualifikasi masih ada yang	Pada dasarnya penulisan pasal Dakwaan dan kualifikasi harus lengkap sesuai dengan pasal yang didakwakan dan kualifikasi pasal tersebut	Kurang telitinya petugas dalam mengisi buku register himpunan putusan sehingga ada kolom yang tidak tuntas dalam penulisananya	Penulisan pada kolom Dakwaan dan kualifikasi tidak lengkap dan dapat menjadi temuan oleh pengawas pada saat Binwas Dilimliti dan Dilimlita.	Agar Panitera menekankan kepada Panitera Pengganti dalam menulis pada buku Register Himpunan Putusan ditulis dengan lengkap sesuai kualifikasi	Penulisan pada buku Register Himpunan Putusan sudah disesuaikan dengan kualifikasi pada amar putusan

		<p>disingkat seperti pada nomor urut 13, 14, 15, 16 dan 18 ditulis "desersi" seharusnya penulisannya "Desersi dalam waktu damai"</p>				<p>pada amar putusan sehingga meminimalisi temuan dan sesuai dengan judul kolom dan Tertib administrasi dalam pengisian buku.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan Persidangan



Samsul Arifin
Mayor Chk

Yogyakarta, Juli 2025
Panitera



Tambah
Kapten Chk

Mengetahui,
Koordinator Hakim Pengawas Bidang



Tabah Prasetya
Letnan Kolonel Chk

**Laporan Tindak Lanjut Hakim Pengawas Bidang
Pada Bidang Administrasi Perkara Persidangan Triwulan II Tahun 2025**



Sudah dilakukan Penulisan dan Penempelan Nomor Berkas Perkaran dan Tahun Putus di BOX Berkas Perkara.



Sudah dilakukan penyesuaian penulisan kualifikasi amar putusan pada Buku Register Himpunan Putusan.